

INDIKASI *FINANSIAL INCLUSION* DI PEDESAAN DAN KONTRIBUSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR PRODUKTIF

Harfandi dan Hesi Eka Puteri*

Abstract: The contribution of Islamic Rural Banking (popular as BPRS in Indonesia) in supporting of real sectors as financial inclusion's indication, can be done by many program such as: 1) Increasing branch office and channeling office of Rural Banking, 2) Increasing the accessibility of rural banking for micro enterprises, 3) Implementing the service system which customer oriented and social justiced, 4) Expansion of the product which suitable for community, 5) Reinforcement the strategy in realizing financial inclusion 6) Reinforcement in regulation's strategy, 7) Reinforcement in socialization's strategy, 8) Reinforcement in competition's strategy and 9) Reinforcement in human resource's strategy.

Keywords: Indication, Contribution, development

*Staf Pengajar STAIN Bukittinggi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Teramati Data BPS untuk tahun 2013 menunjukkan 28,07 juta orang penduduk miskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan mencapai 11,37%. Persoalan kemiskinan ini bukan hanya keterbatasan ekonomi masyarakat namun melingkupi akses mereka terhadap kebutuhan dasar.

Bappenas mendefinisikan kemiskinan ini sebagai sebuah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Islam memiliki konsep sempurna dalam membangun masyarakat, yang berlandaskan al-Quran dan Hadits. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Norma dan Etika Ekonomi Islam menyebutkan ada empat ciri khas ekonomi Islam yang membedakannya dengan ekonomi konvensional yaitu ketuhanan (tauhid), etika (akhlak), kemanusiaan dan sikap pertengahan (keseimbangan). Islam menganjurkan suatu system yang sederhana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang membolehkan melakukan pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan system kapitalis dan sosialis.¹

Melalui system keuangan yang inklusif (*financial inclusion*), *community development* akan lebih efektif karena mampu menggerakkan sektor-sektor produktif yang ada di masyarakat, karena sektor moneter merupakan sector penunjang berkembangnya sektor riil. Pada prinsipnya konsep *financial inclusion* adalah koreksi terhadap *financial exclusion* yaitu sebuah kondisi keuangan yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Sedangkan *financial inclusion* merupakan sebuah konsep dimana terdapat kemudahan akses perbankan bagi semua orang.

Penguatan konsep *Community Development* melalui lembaga keuangan syariah merupakan salah satu solusi percepatan pembangunan ekonomi

terutama di wilayah perdesaan. Struktur perekonomian Indonesia yang didominasi ekonomi mikro kecil menengah, paham ekonomi kerakyatan serta boomingnya ekonomi syariah memberi ruang berkembangnya institusi perbankan syariah yang mengkedepankan social justice (berkeadilan sosial) yaitu perbankan syariah.

Islamic Microfinance (dalam hal ini BMT-BMT) dan BPR Islam (populer dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS) merupakan dua institusi perbankan syariah yang sebenarnya sudah eksis dalam penerapan *financial inclusion* itu sendiri. Terdapat 163 BPRS dengan 402 kantor cabangnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2013². Demikian juga dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang mencapai jumlah lebih dari 5.500 unit, yang kebanyakan tersebar di wilayah urban dan perdesaan. Keberadaan BPR Islam dan microfinance ini focus pada penyelamatan usaha local dan usaha mandiri agar terciptanya kemudahan akses untuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan layanan perbankan yang pro rakyat.

Faktanya memperlihatkan bahwa meskipun perkembangan BPRS ini cukup pesat (sebesar 18,12 % dalam 5 tahun terakhir), Bank Indonesia mengklaim relatif masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum bisa mengakses pelayanan jasa keuangan. Hasil survey Neraca Rumah Tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada 2010 menyimpulkan bahwa sebesar 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali. Hasil studi World Bank juga menyimpulkan hal yang relevan bahwa hanya separuh dari penduduk Indonesia yang memiliki akses ke system keuangan formal.³

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setengah dari penduduk Indonesia yang melek perbankan. Sebesar 52 persen rumah tangga di Indonesia belum memiliki simpanan di lembaga keuangan. Hal inilah yang membatasi kemampuan masyarakat untuk terhubung dengan kegiatan-kegiatan di sektor produktif.

Fenomena ini berlanjut pada pertanyaan penting bagaimanakah indikasi-indikasi eksisnya konsep *financial inclusion* di perdesaan? Meski jumlah jaringan bank dan kantornya bertumbuh cukup besar, namun realisasi *financial inclusion* belum lagi optimal. Jumlah BPRS belum mampu menjadi indikator terealisasi-nya “perbankan untuk semua” di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat perdesaan yang sering termarginalkan dalam layanan perbankan.

Kajian ini penting untuk diteliti lebih lanjut sebagai sebuah studi yang mencoba untuk mengupas indikasi *financial inclusion* di pedesaan Indonesia, berikut tentang apa persoalan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini lebih lanjut akan memetakan persoalan-persoalan kronis dalam merealisasikan konsep *financial inclusion* di pedesaan, dan merekomendasi kebijakan terkait peran BPRS dalam pengembangan sektor-sektor produktif di pedesaan.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah indikasi-indikasi *financial inclusion* di pedesaan dan kontribusi BPRS dalam pengembangan sector-sektor produktif?”

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis indikasi *financial inclusion* dalam pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan di Indonesia
2. Untuk mengevaluasi seberapa besar peran BPRS dalam pengembangan sector-sektor produktif khususnya di wilayah pedesaan

4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap keilmuan. Dalam perspektif keilmuan, penelitian ini bermanfaat sebagai sebuah bentuk eksplanasi terhadap sebuah fenomena sosial berlatar kepentingan masyarakat marginal terutama di pedesaan.
2. Kontribusi terhadap lembaga keuangan Syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengelola BPRS terutama pada persoalan-persoalan dan tantangan dalam mencapai misi BPRS sebagai sebuah lembaga yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang
3. Kontribusi Terhadap Regulator dan Stakeholder (praktisi perbankan syariah, akademisi, supplier dan pemerintah). Penelitian ini memberikan kontribusi bagi *decision maker* dan pemerintah untuk lebih intens menjadikan BPRS sebagai icon pemberdayaan sector-sektor produktif pedesaan dan merekomendasi strategi untuk mengoptimalkan peran BPRS dalam merealisasi program nasional *financial inclusion*.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Studi-Studi Terdahulu

Penelitian-penelitian tentang lembaga keuangan syariah yang ada terkonsentrasi pada kajian-kajian empiris dengan kasus-kasus mikro pada BMT-BMT atau BPRS, yang mengamati tentang pengaruh pembiayaan yang disalurkan terhadap peningkatan pendapatan pengusaha mikro. Tulisan ini dapat dilihat pada studi Satria Laksono (UIN Jakarta;2011), Rozalinda (IAIN Imam Bonjol Padang;2011) dan Fitra Ananda (UNDIP;2011). Temuan penelitian pada umumnya menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan yang diberikan mampu meningkatkan pendapatan pengusaha mikro tersebut.

Beberapa kajian terkait *financial inclusion* masih amat terbatas ditemukan kecuali studi-studi yang dilakukan Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) yang merupakan kajian yang bersifat konseptual atau sebuah wacana namun belum berupa kajian empiris yang mengevaluasi perkembangan strategi *financial inclusion*.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kebijakan yang mengeksplorasi indikasi-indikasi *financial inclusion* di perdesaan serta kaitannya dengan peran terbesar yang dilakukan BPRS sebagai ikon sektor moneter di perdesaan. Penelitian ini akan diawali dengan melihat indikator-indikator potensi *financial inclusion* di perdesaan. Pengambilan kasus pada tingkat nasional dilatarbelakangi dengan eksisnya isu ini ditingkat nasional sebagai bentuk sebuah model pembangunan sektor jasa keuangan yang inklusif yang dalam perkembangannya mengalami berbagai polemik yang menarik.

2. Kerangka Teori

a. *Financial Inclusion*

Financial inclusion menjadi topik populer yang dibicarakan publik tentang eksistensi perbankan syariah dalam pembangunan perekonomian. Sebuah tema moralis yang menginginkan perbankan sebagai sebuah institusi keuangan yang melayani semua lapisan masyarakat. Topik ini menjadi hangat baik dikalangan perbankan konvensional maupun syariah, dan menjadi kebijakan pada hampir semua institusi keuangan di Indonesia.

Meski tantangan penerapan *financial inclusion* begitu besar, bagi negara-negara berkembang penerapan *financial inclusion* merupakan obat mujarab untuk menyelamatkan negara dari kemiskinan berkepanjangan, melalui

penyelamatan usaha-usaha produktif masyarakat. Secara khusus penerapan *financial inclusion* ini bertujuan untuk:

- a) Memberikan akses kemudahan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan akses pembiayaan.
- b) Memberikan Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Sektor Moneter

Dalam upaya mewujudkan keuangan inklusif Bank Indonesia telah menetapkan enam pilar strategi yang meliputi edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi serta perlindungan konsumen.⁴

Keadaan *financial inclusion* di Indonesia sangat rendah yang disebabkan karena beberapa hal seperti *Financial Literacy* nya masih rendah, Pendapatan masyarakat masih rendah dan Lembaga keuangan yang masih sedikit. Namun dengan adanya keterlibatan BPR *financial inclusion* di Indonesia mulai meningkat karena beberapa fleksibilitas yang ditawarkan BPR seperti:

- a) BPR lebih dekat dengan rakyat khususnya masyarakat menengah bawah
- b) BPR juga menyediakan layanan jasa perbankan yang mudah diakses masyarakat
- c) Orientasi laba yang diambil oleh BPR jauh lebih kecil dari bank umum, sehingga BPR lebih mudah menarik masyarakat
- d) BPR membiayai sektor usaha kecil dan menengah

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di daerah pedesaan (rural), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) hadir dengan fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR dalam fungsinya sebagai lembaga intermediary:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

BPRS menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary dengan memperluas penggunaan produk-produk pendanaan dan pembiayaan syariah dalam merekatkan sector keuangan dan sector riil. BPRS mengutamakan transaksi-transaksi yang bersifat produktif dibandingkan konsumtif apalagi spekulasi.

Tujuan operasionalisasi BPR Islam adalah:⁵

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan
- 2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi
- 3) Membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai

c. Sektor-sektor Produktif

Dalam dunia ekonomi dikenal dua macam sektor yaitu sektor riil dan sektor keuangan. Sektor riil dibagai menjadi dua yaitu barang dan jasa. Sektor riil ini dikenal juga dengan sektor produktif karena merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan benda baru dalam memenuhi kebutuhan.

Terkait dengan strategi *financial inclusion* di Indonesia, sektor produktif yang menjadi segmentasi BPRS adalah Usaha mikro. Usaha mikro ini dicirikan dengan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil tradisional informal yang belum terdaftar dengan modal usahanya tak lebih dari 100 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tak lebih dari 5 orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriyah dengan mengandalkan insting atau pengalaman dalam berusaha.⁶ Jenis usaha ini meliputi usaha perdagangan (seperti: dagang kelontong, bakso, warung

nasi), jasa (seperti jasa tukang cukur, tambal ban, bengkel, penjahit), pengrajin (seperti per kayu, cenderamata, anyaman) dan pertanian/peternakan (seperti palawija, ayam, lele). Pengusaha mikro identik dengan pelaku ekonomi yang termarginalkan dan seringkali luput dari perhatian pengambil kebijakan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan *descriptive analitic*. Penelitian fokus pada analisis laporan-laporan perkembangan tahunan BPRS di Indonesia dan observasi terhadap objek kajian

2. Data dan Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan laporan tahunan/statistik perbankan syariah di Bank Indonesia dan otoritas Jasa Keuangan serta dokumentasi BPRS-BPRS terpilih.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *dokumentasi, dan observasi* a) Dokumentasi; dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan data sekunder baik yang terpublikasi maupun tidak tentang objek kajian, yaitu data yang terkait dengan laporan-laporan keuangan BPRS di Bank Indonesia dan laporan tahunan pada BPRS-BPRS terpilih, b) Observasi; dilakukan terhadap objek penelitian yaitu BPRS-BPRS yang terpilih secara purposive.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah gabungan dari beberapa teknik yang relevan untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian, yaitu:

- a) Untuk mengeksplanasikan indikasi *financial inclusion* dalam pembangunan ekonomi, maka data sekunder hanya akan dideskripsikan dengan cara deskriptif kualitatif. Data akan ditampilkan secara naratif terhadap indikator-indikator relevan dalam laporan keuangan BPRS.
- b) Untuk melihat kontribusi dan strategi inovatif yang diterapkan BPRS dalam pengembangan sector-sector produktif dalam perekonomian terutama usaha mikro kecil menengah diaplikasikan dengan cara mengkomparasi data menurut *cohort* waktu dan *descriptive analitic* terhadap hasil pengamatan dari unit kajian secara purposive.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Penerapan *Financial Inclusion* di Indonesia

Program keuangan inklusif merupakan upaya mendorong system keuangan agar dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Program ini dipacu oleh pemerintah khususnya oleh otoritas bank sentral dan otoritas jasa keuangan mengingat masih rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan.

UMKM adalah segmentasi utama dalam keuangan inklusif ini karena porsi terbesar dari struktur perekonomian di Indonesia di dominasi oleh sektor UMKM. Berikut adalah data UMKM di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Terlihat bahwa dari segi jumlah, UMKM mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia. Sebesar 99.99 % unit usaha yang ada di dominasi oleh UMKM, dan memberikan kontribusi kepada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,48%. Sebuah segmen pasar yang bagus bagi industry keuangan jika saja semua UMKM melek perbankan (bankable). Dengan semakin luasnya akses UMKM terhadap Lembaga Keuangan, maka besar harapan untuk dapat menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan. Perbankan akan memegang peransentral dalam pemberdayaan usaha-usaha rakyat yang sebagian besar terkendala pada modal. *Financial Inclusion* tentu saja adalah sebuah layanan yang pro rakyat yang mengantarkan kemandirian dalam berusaha.

Tabel.1

Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah dan Usaha Besar (dalam unit) Tahun 2011-2012

Unit Usaha	2011	2012
Usaha Mikro	54.559.969	55.856.176
Usaha Kecil	602.195	629.418
Usaha Menengah	44.280	48.997
Usaha Besar	4.952	4.968
Jumlah	55.211.396	56.539.560

Sumber: Data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menenga RI, www.depkop.go.id

Implementasi keuangan inklusif ini menjadi penting dilakukan terutama di wilayah perdesaan. Relatif lebih rendahnya pendidikan masyarakat dan

terbatasnya infrastruktur dan lembaga keuangan menjadikan masyarakat di pedesaan adalah segmentasi tepat dalam akselerasi wacana system keuangan ini. Fakta rendahnya tingkat literasi perikanan (melek keuangan) dipedesaan ini terlihat dari fakta relative masih rendahnya tingkat “bankable” masyarakat pedesaan dalam menjalankan usaha-usaha produktif. Semua manajemen usaha terutama usaha mikro lebih banyak dikelola secara tradisional dengan tidak melibatkan fasilitas perbankan.

Meskipun demikian, Bank Indonesia mencatat bahwa upaya kearah realisasi terhadap hal ini sudah terlihat. Data pada tabel. 2 berikut memperlihatkan perkembangan jumlah kredit UMKM yang tersalurkan pada berbagai unit usaha. Terlihat bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 33.37% dari jumlah kredit tersalurkan ke UMKM, dengan porsi terbesar pada usaha menengah.

Tabel. 2

Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM Menurut Klasifikasi Usaha

Unit Usaha	2011	2012	2013
Usaha Mikro	102.905,0	113.754,0	137.929,8
Usaha Kecil	150.912,1	169.882,5	193.874,7
Usaha Menengah	226.069,4	268.589,5	308.230,0
Jumlah	479.886,5	552.226,1	640.034,5

Sumber: Bank Indonesia (Grup Pengembangan UMKM - DPAU)

Lebih lanjut peran BPR dan BPRS yang berada di pedesaan juga mencatat adanya kenaikan peran perbankan dalam pemberdayaan UMKM ini. Tabel.3 berikut memperlihatkan perkembangan modal tersalurkan pada sektor UMKM menurut klasifikasi bank. Teramati bahwa kontribusi yang diberikan BPR dan BPRS terus mengalami peningkatan, meski porsi terbesar masih diambil peran oleh Bank Persero. Hal ini terjadi karena jaringan bank ini yang sudah berkembang jauh lebih dulu dan telah meluas ke berbagai wilayah hingga pedesaan. Adapun BPR dan BPRS yang dulunya di kenal dengan bank desa, lebih mengambil peran sebagai sektor moneter penyangga di pedesaan atau daerah pinggiran perkotaan. Dari segi waktu pengembangan yang masih baru dan wilayah kerja pedesaan yang tentu saja minim pada segala aspek, wajar jika kontribusi kredit tersalur jauh lebih sedikit dari bank lainnya. Meski begitu, pertumbuhan yang senantiasa meningkat memperlihatkan sebuah eksistensi nyata dari kontribusi BPR dan BPRS dalam pengembangan UMKM.

Tabel. 3

Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM Menurut Klasifikasi Bank

Unit Usaha	2011	2012	2013
Bank Persero	222,645.1	242,861.1	304,750.6
Bank Swasta Nasional Devisa	176,924.8	205,731.2	217,529.4
Bank Swasta Nasional Non Devisa	17,308.8	23,259.7	27,571.6
BPD	31,313.9	45,081.8	46,895.9
Bank Campuran	6,651.3	8,750.1	11,378.7
Bank Asing	3,320.0	712.6	697.1
BPR-BPRS	21,722.5	25,829.5	31,211.1
Jumlah	479.886,5	552.226,1	640.034,5

Sumber: Bank Indonesia (Grup Pengembangan UMKM- DPAU)

Gambaran tentang pelaksanaan financial inclusion ini sekilas memperlihatkan akan banyaknya persoalan yang masih harus dibenahi oleh pengambil kebijakan. Otoritas Bank Sentral dan pemerintah memegang kunci suksesnya wacana tersebut. Bank Sentral-Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah merupakan tiga pengambil kebijakan yang utama. Upaya menjadikan sector moneter sebagai penggerak sector riil bukanlah upaya mudah tanpa adanya komitmen berbagai pihak, dan tidak ada salahnya juga Indonesia dapat belajar dari negara lain seperti Kenya yang berhasil menerapkan *Financial Inclusion*.

Terdapat beberapa hal utama yang menjadi tugas besar pengambil kebijakan yaitu memfasilitasi adanya: 1) Akses perbankan yang mudah bagi si miskin untuk bisa menikmati jasa perbankan, 2) Perbankan yang murah dan terjangkau. Hal ini tentunya berkaitan dengan bunga atau sistem bagi hasil yang jika perlu ada subsidi silang antara nasabah kaya dan nasabah miskin, 3) Bank tidak sekedar menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan untuk menyimpan dan menyalurkan dana pada masyarakat, akan tetapi ada program pemberdayaan bagi masyarakat, 4) Membuat program pengentasan kemiskinan tidak sekedar memberikan bantuan langsung yang bersifat konsumtif seperti Bantuan Langsung Tunai atau Raskin yang membodohkan masyarakat, akan tetapi di ubah dengan sebuah pemahaman bahwa "pemerintah memberikan kail untuk memancing dan bukan memberikan ikan untuk di masak", 5) Mendidik masyarakat untuk paham uang dan bank, sehingga warga miskin nantinya menjadi *Bankable*, 6) Yang paling penting dalam hal ini adalah perbankan tidak rugi dalam pelaksanaan *Financial Inclusion* ini.

2. **Indikasi Kontribusi BPRS Merealisasikan *Financial Inclusion* : Fakta dan Persoalan**

Perkembangan bank syariah menjadi salah satu tolak ukur eksistensi bank syariah dalam pembangunan ekonomi. Fakta empiris memperlihatkan sebuah akselerasi yang nyata perkembangan bank syariah di Indonesia, terutama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan Bank Syariah yang diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 menjadi momentum awal tumbuh kembang perbankan syariah lainnya di Indonesia. Bank Umum Syariah pertama yang awalnya hanya di gawangi oleh Bank Muamalat Indonesia ini kemudian di ikuti oleh pertumbuhan Usaha Unit Syariah (UUS) oleh bank konvensional yang memberikan pilihan layanan syariah bagi nasabahnya. BPR yang awalnya beroperasi dengan cara konvensional, juga berkembang menjadi BPRS, yaitu BPR yang dijalankan dengan prinsip Islam.

BPRS membidik pangsa pasar yang berbeda dengan jaringan perbankan syariah di atas. BPRS fokus sebagai perbankan yang melakukan pengembangan perekonomian di wilayah rural (pinggiran) dan pedesaan di Indonesia. Perkembangannya tidak terlepas dari tujuan BPRS sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada prinsipnya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) adalah layanan perbankan yang memiliki prinsip serupa dengan BPR, namun layanan perbankan yang diberikan adalah dalam prinsip-prinsip syariah.

Indikasi-indikasi adanya kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dalam merealisasikan wacana *Financial Inclusion* terlihat dari beberapa fakta berikut:

d. Peningkatan Jumlah Kantor dan Jaringan BPRS

Kemudahan akses perbankan di fasilitasi oleh peningkatan kantor dan jaringan BPRS. Tabel.4 memperlihatkan indikasi perkembangan bank syariah di Indonesia termasuk BPRS sepanjang 5 tahun terakhir.

Tabel. 4

Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2009-2013

Jaringan Kantor Perbankan Syariah	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah (BUS)					
• Jumlah Bank	6	11	11	11	11
• Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998
Unit Usaha Syariah (UUS)					
• Jumlah Bank	25	23	24	24	23
• Jumlah Kantor	287	262	336	517	590
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)					
• Jumlah Bank	138	150	155	158	163
• Jumlah Kantor	225	286	364	401	402

Sumber: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan OJK tahun 2014

Aksesibilitas atau kemudahan-kemudahan masyarakat dalam menjangkau perbankan syariah sangat tergantung pada ketersediaan jaringan kantor perbankan syariah. Ketersediaan jumlah bank dan jumlah kantor menyiratkan jumlah layanan yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Semakin tersebar jaringan perbankan syariah semakin mudah akses masyarakat terhadap perbankan syariah. Data pada tabel. 4 memperlihatkan pertumbuhan yang cukup signifikan pada jumlah Bank Umum Syariah dan BPRS sepanjang 5 tahun terakhir. Dilihat dari jumlah pertambahan Bank, BPRS memiliki pertumbuhan paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,28% pertahun atau meningkat sebesar 18,12% sepanjang 5 tahun terakhir. Tentu saja pertumbuhan jumlah BPRS ini tak bisa dibandingkan dengan pertambahan jumlah BUS atau UUS yang ada karena, proses perijinan dan pendirian BPRS tidak serumit pada Bank Umum Syariah.

Persoalan distribusi layanan perbankan syariah bagi masyarakat bukanlah persoalan banyaknya jumlah bank namun persoalan akses layanan. Jumlah kantor yang banyak menyiratkan layanan yang juga semakin baik. Dengan jumlah kantor yang banyak berarti wacana *financial inclusion* semakin nyata terlihat. Bank yang banyak tidak memberi jaminan terhadap makin dekatnya layanan perbankan syariah bagi setiap lapisan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai jumlah bank di Indonesia saat ini sudah terlalu banyak.

Lebih jauh, perkembangan BPRS dalam merealisasi *financial inclusion* di perdesaan dapat terlihat pada *performance ratio* keuangannya. Perkembangan

yang cukup pesat pada BPRS teramati dari perubahan jumlah BPRS yang begitu cepat pada kelompok BPRS menurut total asset mereka. Jika pada tahun 2007, komposisi BPRS dengan asset di bawah 10 miliar mencapai 73% dari BPRS yang ada, maka akhir tahun 2013 hanya lebih kurang 32 % BPRS yang memiliki asset kurang dari 10 miliar. Sisanya 68 % memiliki asset lebih dari 10 miliar.

Tabel. 5

Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Rasio Keuangan	2009	2010	2011	2012	2013
CAR	29,98%	27,46%	23,49%	25,16%	22,08%
ROA	5,00%	3,49%	2,67%	2,64%	2,79%
ROE	21,55%	14,29%	18,95%	20,54%	21,22%
NPF	7,03%	6,50%	6,11%	6,15%	6,50%
FDR	126,89%	128,47%	127,71%	120,96%	120,93%
BOPO	64,69%	78,08%	76,31%	80,02%	80,75%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2013

Dalam tabel.5 terlihat perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau ratio kecukupan modal yang cukup baik. CAR di defenisikan sebagai sebuah rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar ratio tersebut akan semakin baik posisi modal. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 menjadi acuan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR). Nilai CAR ini menunjukkan upaya ekspansi yang dilakukan oleh BPRS. Upaya ekspansi ini biasanya dapat dilakukan dengan memperluas wilayah kerja, memperbanyak kantor kas, atau dengan memperluas pangsa pasar. Nilai CAR untuk BPRS-BPRS di Indonesia menunjukkan performance yang cukup baik dengan angka rata-rata sebesar 25,63%. Diatas nilai minimum BI sebesar 8%. CAR yang cukup tinggi memberikan jaminan bahwa BPRS memiliki kemampuan dalam mempertahankan modal yang mencukupi. Sebuah indikasi adanya peran BPRS yang cukup baik dalam mengembangkan sector produktif.

e. Peningkatan Aksesibilitas ke Sektor UMK

Peningkatan *accessibility* UMK ke layanan perbankan syariah merupakan hal utama dalam pengembangan BPRS sebagai *rural banking*. Apakah jumlah BPRS yang ada mencukupi untuk melayani aktifitas ekonomi di perdesaan? Tentu saja jawabannya belum dan BPRS bukanlah satu satunya akses layanan perbankan bagi pelaku sektor ekonomi mikro kecil menengah. Ekonomi bertumbuh dan pertumbuhan perekonomian memerlukan dukungan luas dari layanan perbankan. Terdapat 56,53 juta unit usaha mikro kecil menengah yang ada di Indonesia dengan persentase terbesar 98,8% di antaranya adalah usaha mikro (UMi).⁷ Sektor ini menjadi bagian terbesar dalam perekonomian dan membutuhkan ketersediaan sektor moneter yang mampu mengimbangnya.

Khusus wilayah perdesaan di Indonesia yang merupakan sentra usaha kecil-mikro, pertumbuhan akses terhadap BPRS masih jauh dari mencukupi. Keberadaan Bank Umum Syariah (BUS) pada umumnya terkonsentrasi di daerah perkotaan dan juga minim akses terhadap usaha mikro. BUS lebih banyak melayani pembiayaan untuk plafond besar dan korporasi. Akses usaha mikro terhadap layanan perbankan terhalang karena alasan klasik bahwa UKM belum memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan sehingga para pelaku UKM memandang prosedur pembiayaan sulit, seperti tidak adanya jaminan dalam mengajukan pembiayaan atau lemahnya kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan pengajuan pembiayaan. Lebih lanjut temuan lapangan Herri dkk mengindikasi beberapa faktor yang menjadi kendala BPR dalam menyalurkan dana ke usaha Mikro Menengah (UMK) berdasarkan sudut pandang BPRS yaitu berkaitan dengan beberapa aspek seperti relatif tingginya tingkat bunga yang ditawarkan BPR ke masyarakat, belum tersosialisasinya keberadaan BPR di tengah masyarakat terutama masyarakat perdesaan yang menjadi pasar potensial BPR, adanya image di kalangan pasar potensial bahwa berhubungan dengan BPR sulit dan menurunkan harga diri, keterbatasan BPR dalam mengelola dan mengembangkan produk inovatif, keterbatasan modal BPR dalam melakukan perluasan kredit, terbatasnya produk dan skim pembiayaan yang ditawarkan oleh BPR kepada UMK, tingginya tingkat persaingan BPR dengan sesama BPR maupun dengan lembaga keuangan lainnya.⁸

Meski demikian jika diamati lebih jauh distribusi pembiayaan yang telah di salurkan oleh BPRS sepanjang 5 tahun terakhir terlihat bahwa telah

terjadi peningkatan dalam penyaluran pembiayaan. Tabel. 6 memperlihatkan komposisi pembiayaan oleh BPRS sepanjang 5 tahun terakhir menurut sektor ekonomi yang dibiayai:

Tabel. 6
Distribusi Pembiayaan Oleh BPRS Tahun 2009-2013 Berdasarkan Sektor Ekonomi Yang dibiayai (%)

Sektor Ekonomi	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	3,4	5,2	8,3	9,9	8,8
Pertambangan	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1
Perindustrian	1,3	1,2	1,3	0,9	0,9
Listrik, gas dan air	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Konstruksi	3,0	3,2	3,5	3,5	3,5
Perdagangan, Restoran dan hotel	30,6	30,3	37,6	34,4	32,6
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1,1	1,1	1,4	1,9	1,6
Jasa Dunia Usaha	11,1	13,4	9,5	7,4	7,6
Jasa Sosial/ Masyarakat	1,0	1,3	3,4	6,4	8,2
Lain-Lain	48,2	44,2	34,76	35,3	36,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013, data diolah

Berdasarkan distribusi pembiayaan pada tabel.6 terlihat bahwa terdapat 3 sektor utama yang paling dominan dibiayai oleh BPRS yaitu sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian, sektor perdagangan restoran dan hotel serta sektor lainnya. Ketiga sektor ini merupakan sektor-sektor *leading* yang banyak didominasi oleh usaha-usaha kecil mikro dan sektor-sektor ini jugalah pemberi kontribusi terbesar pada GDP (*Gross Domestic Product*) selain sektor manufaktur. Sepanjang tahun pengamatan terlihat bahwa untuk sektor perdagangan restoran dan hotel dibiayai sebesar rata-rata 33.1 % dan sektor lainnya dibiayai rata-rata sebesar 39,8%. Keduanya adalah sektor-sektor utama dimana para pelaku usaha mikro kecil menengah berada.

f. Perbaikan Sistem Layanan Perbankan yang beorientasi *Customer Oriented dan Social Justiced*

Kemudahan-kemudahan yang diberikan BPRS dalam pelayanan perbankan syariah, juga teramati dari sistem layanan yang bersifat *customer oriented*. Pemasaran jasa di BPRS mengutamakan pelanggan karena sektor-sektor yang dibiayai adalah mereka yang berada di sekitar BPRS. Konsep *customer relationship marketing* (pemasaran relasional) ini dapat didefinisikan berbeda dengan sistem marketing konvensional karena berfokus pada mempertahankan pelanggan dan komitmen yang tinggi terhadap pelanggan.⁹

Implementasi di BPRS terlihat dalam bentuk layanan yang mengutamakan nasabah dalam setiap aktifitas *funding-lending*. Sistem jemput bola atau *personal selling* dalam pemasaran adalah salah satu contoh kemudahan yang menjadi keunggulan BPRS dalam merealisasi *financial inclusion* di tengah masyarakat. Target pasar BPRS yaitu masyarakat perdesaan dan didominasi oleh sektor-sektor produktif mikro kecil yang memerlukan proses yang mudah, cepat dan persyaratan ringan. Pelayanan BPRS tepat untuk nasabah yang terutama terdiri dari UMK yang kesehariannya berada di pasar atau toko yang memang sulit untuk ditinggalkan.

Penganekaragaman produk-produk perbankan syariah di level BPRS bertujuan untuk lebih memberikan layanan perbankan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPRS diharapkan menjadi salah satu lembaga keuangan yang eksis di wilayah pinggiran atau perdesaan, dengan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan *local wisdom* di wilayah masing-masing. Karena BPRS merupakan lembaga keuangan yang memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah perdesaan. BPRS memang didirikan untuk melayani usaha kecil dan mikro.

g. Penganekaragaman Produk-Produk Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat .

Penganekaragaman produk perbankan yang di berikan BPRS terlihat dari fakta adanya beragam jenis produk pendanaan dan pembiayaan pada masing-masing BPRS di Indonesia. Penamaan produk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dimana BPRS beroperasi, namun dengan skim akad yang legal dan sesuai dengan ketentuan BI dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) meliputi dana tabungan dan deposito. Seperti halnya

Bank Syariah, komposisi dana DPK ini meliputi segala jenis tabungan dengan akad wadiah atau akad mudharabah, yang disesuaikan dengan *local wisdom* dimana BPRS berada. Dibeberapa daerah bahkan tersedia beragam tabungan khas daerah seperti tabungan Rencana, Tabungan Haji, tabungan Qurban dan lain sebagainya. Sedangkan pada sisi pembiayaan, BPRS menawarkan pembiayaan dengan berbagai skim akad seperti halnya di Bank syariah seperti pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, Qard* dan Multi jasa. Sekali lagi untuk penamaan terkadang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Seperti halnya di Bank syariah, distribusi terbesar pada pembiayaan tetap didominasi oleh pembiayaan murabahah. Sebesar 79,99% dari total pembiayaan di BPRS tahun 2013 di salurkan kepada nasabah dalam akad murabahah. Hal ini hanya berbeda tipis dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka lebih dari 80%.¹⁰ Dapat dimaklumi kenapa BPRS lebih banyak menerapkan akad murabahah dalam berbagai transaksinya pembiayaan. Hal ini di akibatkan karena manajemen resiko yang terkadang berjalan kurang baik di BPRS. Terlepas dari persoalan penerapan akad pembiayaan yang di dominasi oleh akad murabahah, BPRS telah menjalankan perannya dengan memberikan kemudahan layanan perbankan dalam bentuk keaneka ragaman produk *funding-lending* kepada masyarakat. Skim pembiayaan di sesuaikan dengan kebutuhan dimasing-masing komunitas masyarakat dimana BPRS berdomisili.

h. Penguatan Strategi Bagi BPRS dalam Merealisasi *Financial Inclusion*

Peningkatan kantor dan jaringan BPRS, peningkatan aksesibilitas ke sektor UMK, sistem layanan perbankan yang beorientasi *customer oriented* dan *social justiced*, serta penganekaragaman produk-produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak serta merta mampu menjadi indikator telah optimalnya wacana *financial inclusion* terealisasi di wilayah pedesaan. Beberapa persoalan muncul da menjadi batasan bagi BPRS untuk mengoptimalkan fungsi *intermediary*-nya. Belajar pada kasus permasalahan dan pengembangan perbankan syariah di Malaysia, negara yang menjadi panduan dalam akselerasi perbankan syariah, terlihat bahwa permasalahan hukum, permasalahan sosialisasi, permasalahan daya saing dan permasahan sumber daya manusia adalah beberapa permasalahan utama dalam pengembangan perbankan syariah.¹¹ Penguatan pada beberapa hal tersebut diperlukan oleh BPRS-BPRS dalam mengoptimalkan fungsi dan tujuannya.

i. Penguatan Strategi Regulasi

Regulasi merupakan hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang bersifat pengaturan. Tahap awal dari sebuah pengembangan perbankan yang tepat adalah adanya regulasi yang mengatur dan memberi pedoman dalam rangka penetapan strategi implementasi yang tepat bagi pengembangan BPRS agar lebih terarah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan dua lembaga negara yang menjalankan fungsi regulasi untuk perbankan di Indonesia. Jika Bank Indonesia (BI) merupakan Bank Sentral yang bertanggungjawab dalam lalu lintas sistem moneter, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk BPRS.

Secara regulatif perlu adanya kepastian aturan yang mendukung BPR sebagai lembaga keuangan yang memiliki ciri yang spesifik sebagai *community bank* dan memiliki keunggulan komparatif di banding Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Otoritas Moneter dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah memiliki cetak biru pengembangan BPR yang tetap diarahkan pada penguatan kapasitas industri melalui permodalan, kontinuitas usaha BPR, peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan.¹² Namun regulasi mestilah memberi ruang untuk diterapkannya beberapa kemudahan yang mendorong perkembangan BPRS sebagai *community bank* seperti: a) BPRS diberi kemudahan secara regulatif untuk mengembangkan kantor dan jaringan b) BPRS diarahkan pada konsep perbankan yang beroperasi dengan memanfaatkan *local wisdom* (kearifan lokal yang meliputi karakter masyarakat, kebutuhan ekonomi setempat, budaya, kepercayaan dan lainnya), c) Penganekaragaman produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan BPRS. Keterbatasan regulasi pada beberapa hal diatas terkadang membuat BPRS hanya “perpanjangan tangan” pemasaran dari bank umum syariah yang menjadi bank induknya atau malah BPRS bersaing dengan bank umum syariah yang juga membuka kantor cabang pembantu, kantor kas atau *sales outlet* di wilayah operasional BPRS.

j. Penguatan Strategi Sosialisasi.

Sosialisasi BPRS terkait dengan upaya membangun pemahaman masyarakat tentang keberadaan BPRS yang lebih dari sekedar bank desa. Tagline perbankan syariah sebagai “*beyond banking*” dibangun dengan baik sebagai upaya

menghadirkan bank syariah yang lebih dari sekedar bank melainkan bank yang mengkedepankan *social justice*. BPRS di deklarasikan sejak awal sebagai *community bank* karena BPRS diharapkan memiliki keunggulan komparatif yang membedakannya dengan Bank Umum. BPRS berperan dalam mendukung pengembangan wilayah setempat (*community development*), karena menjadi lembaga pembiayaan terdekat bagi pelaku sektor produktif khususnya UMK. Sebagai *community bank*, BPRS adalah lembaga keuangan yang memahami karakter, kebutuhan bisnis masyarakat dan memiliki produk dan layanan yang dirancang sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan BPRS

OJK adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam edukasi dan sosialisasi perbankan di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan "*financial literacy*" pada masyarakat. Diharapkan angka melek perbankan di Indonesia tentu saja meningkat, termasuk melek dengan keberadaan BPRS sebagai lembaga keuangan syariah. Sayang sekali bahwa lembaga ini masih sangat baru dan belum dikenal publik terutama masyarakat pedesaan.

k. Penguatan Strategi Daya Saing

Perkembangan perbankan syariah yang "*booming*" semenjak tahun 1998, akibat krisis moneter di Indonesia, membuat perbankan syariah mampu eksis dalam berbagai bidang dan segmen pasar. Setiap lembaga keuangan syariah mulai dari Bank Syariah, BPRS dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) mengambil peran dalam pembangunan ekonomi. Banyaknya lembaga keuangan syariah yang eksis plus keberadaan perbankan konvensional yang sudah terlebih dahulu mapan menjadikan tingkat persaingan lembaga keuangan semakin kuat. Yang mampu bersinergis dengan segala keadaan, memiliki inovasi dan penganeka ragam produk serta layanan prima adalah lembaga keuangan yang mampu berkembang nantinya.

Beberapa penguatan untuk daya saing ini bertujuan agar BPRS memiliki daya saing dalam hal layanan, tingkat bagi hasil yang kompetitif serta profesionalisme pengelolaan perbankan. Upaya peningkatan daya saing ini sudah mulai intensif dilakukan Bank Indonesia sejak tahun 2010 yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: a) Kebijakan layanan e-banking, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPRS b) Peningkatan *Good Corporate Governance*, dan c) Pengembangan infrastruktur BPRS.

Pembentukan Lembaga Apex BPR, merupakan salah satu bentuk nyata upaya peningkatan daya saing BPR dengan lembaga keuangan lainnya yang

lebih kompetitif. Apex tak lain adalah bentuk sinergis antara bank umum dengan BPRS yang berfungsi mengelola *pooling of funds*, mengatasi kesulitan likuiditas, melakukan kerjasama *linkage program*, memberikan bantuan teknis pengembangan teknologi informasi, pengembangan produk, pelatihan, dan jasa sistem pembayaran serta memfasilitasi BPR dalam mencari sumber-sumber dana lain. Asumsi bahwa sistem kerjasama ini berjalan baik maka BPRS-BPRS yang ada tentu saja akan mengalami peningkatan daya saing dan berkembang sesuai fungsinya sebagai *community bank*. Peningkatan daya saing sangat erat juga kaitannya dengan penguatan aspek manajemen dan keuangan BPRS. BPRS dengan manajemen dan keuangan yang sehat akan ekspansi lebih cepat dan hal ini biasanya ditandai dengan kompleksitas usaha yang variatif dengan jaringan kantor yang makin luas.

1. Penguatan Aspek Sumber Daya Insani.

Penguatan sumber daya insani di BPRS indetik dengan penerapan *Good Corporate Governance* di BPRS. Dalam rangka peningkatan kualitas dan standar SDI di BPRS, Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah penyempurnaan seperti: ketentuan *fit and proper test* dalam menyeleksi pemilik dan pengurus BPRS, program sertifikasi dan memfasilitasi peningkatan keterampilan dan pengetahuan SDI melalui pelatihan-pelatihan. Sekali lagi langkah klasik peningkatan anggaran pelatihan adalah suatu hal yang mesti di lakukan. Teramati rata-rata peningkatan anggaran untuk edukasi dan training ini sebesar 34,9% pertahun sepanjang 3 tahun terakhir. Pelatihan terhadap SDI ini memerlukan perhatian yang intensif dari pemilik dan pengurus BPRS, karena resiko operasional yang dihadapi BPRS berbeda dengan bank umum. BPRS mengelola banyak pembiayaan kecil-kecil yang memerlukan mekanisme yang lebih efektif dan efisien. Tak jarang terjadi resiko pembiayaan bermasalah yang berawal dari kurang cakupnya karyawan di BPRS. Beberapa resiko yang kemudian eksis di seperti pembiayaan, banyak BPRS antara lain.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kontribusi BPR dalam merealisasikan wacana *financial inclusion* sudah terlihat jauh sebelum di populerkannya konsep *financial inclusion* itu sendiri, karena BPR adalah sebuah konsep perbankan yang memang sejak awal sudah mengusung fungsi sebagai "*community bank*" dan eksis di wilayah perdesaan

Indonesia. Keberadaan BPR Islam atau yang lebih populer dengan BPRS, tentu juga memperlihatkan kontribusi yang besar dalam merealisasi *financial inclusion* ini. Evaluasi empiris terhadap beberapa fakta seperti: Peningkatan kantor dan jaringan BPRS, Peningkatan Aksesibilitas ke sektor UMK, Sistem Layanan Perbankan yang berorientasi *customer oriented* dan *social justiced*, serta penganekaragaman produk-produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperlihatkan eksistensi BPRS dalam 5 tahun belakangan ini semakin meningkat.

2. Saran

Penelitian ini merekomendasi beberapa saran penguatan terhadap strategi dalam meningkatkan kontribusi BPRS dalam merealisasi *financial inclusion* di wilayah pedesaan. Beberapa rekomendasi penguatan strategi meliputi aspek internal dan eksternal BPRS yang meliputi penguatan strategi regulasi, penguatan strategi sosialisasi, penguatan daya saing dan penguatan aspek sumber daya insani. Penguatan aspek eksternal dan internal BPRS akan menjamin terselenggaranya *community bank* yang handal dan mampu mensupport *community development* di pedesaan.

ENDNOTES

- ¹ Veithzal Rivai. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI., tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara. h.243
- ² Statistik Perbankan Syariah 2013. www.bi.go.id. Diakses tanggal 30 Mei 2014
- ³ Data Bank Indonesia. www.bi.go.id. Diakses tanggal 9 Juni 2014
- ⁴ Data Bank Indonesia. Keuangan Inklusif. www.bi.go.id. Diakses tanggal 9 Juni 2014
- ⁵ Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.h130
- ⁶ Lihat UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pengertian UMKM menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- ⁷ Perkembangan Data UMKM dan UB tahun 2011-2014. Depkop.2014
- ⁸ Herri dkk. *Studi Peningkatan Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat*. Publikasi Bank Indonesia.2013
- ⁹ Rambat Lupiyoadi. *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.h.21
- ¹⁰ Statistik Perbankan Syariah. Bank Indonesia, 2013
- ¹¹ Karnaeen A Perwataadmadja dan Hendri Tanjung (2007). *Bank Syariah: Teori Praktik dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing. H.201.
- ¹² OJK. *Booklet Perbankan Indonesia 2004*. Edisi 1. Maret 2014. h.59

DAFTAR PUSTAKA

- Basri. Ikhwan Abidin, 1989. *Islam dan Ekonomi Pembangunan*. Judul Asli: *Islam and Economic Development*. oleh Umer Chapra. Jakarta : Gema Insani.
- Craig Gary. *Community Capacity-Building: Something Old-Something New...?* . dalam *Critical Social Policy*. No 27 California London New Delhi: Sage Publications.
- Data Bank Indonesia. www.bi.go.id. Diakses tanggal 9 Juni 2014
- Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, www.dep-kop.go.id
- Data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI, www.depkop.go.id
- Data Otoritas Jasa Keuangan. www.ojk.go.id. akses 28 April 2014
- Distribusi PDB Indonesia. *Statistik Indonesia*. www.bps.go.id
- H.A. Djazuli. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002)
- Herri dkk. 2013. *Studi Peningkatan Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat*. Publikasi Bank Indonesia.
- Karnaen A Perwataadmadja dan Hendri Tanjung, 2007. *Bank Syariah: Teori Praktik dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing.
- Marsuki, 2006. *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- OJK. *Booklet Perbankan Indonesia 2004*. Edisi 1. Maret 2014.
- Perkembangan Data UMKM dan UB tahun 2011-2014. Depkop.2014
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3 EI) UII Yogyakarta –BI, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Puteri, Hesi Eka(2013). *The Revitalization of Entrepreneurship's Spirit of Women's Micro Enterprises With Syaria Micro Financial Institution (LKMS) (Study About The Contribution of BMT's Agam Madani in Sub Province Agam Sumatera Barat)* dalam Proceeding 1 " International Conference on Islamic Wealth Management . Published by Tazkia

- University College os Islamic Economics. ISBN:978-979-9152-02-2.
- Rambat Lupiyoadi. *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.h.21
- Statistik Perbankan Syariah 2013. www.bi.go.id. Diakses tanggal 30 Mei 2014
- Triyono (Pejabat Pelaksana Harian Direktur Komunikasi OJK), "*Perbankan RI Kebanyakan, OJK: Lebih Baik Sedikit Tapi Asetnya Besar*", dalam detikFinance, www.detik.com, akses 02-05-2014
- UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pengertian UMKM menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economic*. Jakarta: PT Bumi Aksara,.
- Warkum Sumitro, 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zimmerer. W Thomas and Norman M.Scarborough, 1996. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*, 5th Ed.